

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Hizkia Respatiadi, Beliau Kepala Bagian Penelitian *Center for Indonesian Policy Studies* berpendapat bahwa kondisi pertanian di Indonesia saat ini sangat jauh berbeda pada era pemerintahan Presiden Soeharto dalam hal swasembada (**Respatiadi dalam Liputan6**). Banyak perubahan yang terjadi antara lain, ialah laju jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga semakin terbatasnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk pertanian. Banyaknya pembangunan industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang berakibat terus berkurangnya lahan-lahan untuk bertani. Berdampak juga pada terus berkurangnya jumlah petani karena akses mereka terhadap kepemilikan lahan yang semakin terbatas. Regenerasi di kalangan petani juga berjalan relatif lambat, dikarenakan generasi muda yang tidak tertarik untuk menjadi petani. Sebagian besar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto. Pada tahun 2011, International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 1 miliar lebih penduduk yang bekerja di bidang sektor pertanian. Pertanian menyumbang setidaknya 70% jumlah pekerja anak-anak, dan di berbagai negara sejumlah besar wanita juga bekerja di sektor ini lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Hanya sektor jasa yang mampu mengungguli jumlah pekerja pertanian, yaitu pada tahun 2007. Antara tahun 1997 dan 2007 jumlah tenaga kerja di bidang pertanian turun dan merupakan sebuah kecenderungan yang akan berlanjut.

Sebanyak 54,8 juta orang bekerja disektor pertanian, jumlah ini setara dengan 34,3 persen dari total jumlah pekerja di Indonesia, namun

Fynna Dewi Febriana, 2018

THE PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

termasuk ke dalam kategori miskin. Pernyataan ini bertolak belakang dengan target pemerintah yang ingin mencapai swasembada pangan. Kesejahteraan petani di Indonesia dinilai belum terpenuhi, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menyejahterakan petani. Selain kestabilan harga pangan, kesejahteraan petani juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Hizkia Respatiadi, Kepala Bagian Penelitian *Center for Indonesian Policy Studies* mengatakan kondisi pertanian di Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan era pemerintahan Presiden Soeharto dalam hal swasembada. Perubahan – perubahan yang terjadi antara lain ialah laju jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga semakin terbatasnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk pertanian. Banyaknya pembangunan industrialisasi dan pembangunan infrastruktur menyebabkan terus berkurangnya lahan-lahan untuk bertani. Berdampak juga pada terus berkurangnya jumlah petani karena akses mereka terhadap kepemilikan lahan yang semakin terbatas.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan boenzim, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai pembudidayaan tanaman. Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini

Fynna Dewi Febriana, 2018

THE PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif. Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industri selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dibidang ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi. Oleh karena itu dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia, berbagai cara dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang di Indonesia ini. Segala bidang terus ditingkatkan diantaranya, dalam bidang pendidikan, dimana pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk manusia agar memiliki kemampuan, keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan, karena pelatihan merupakan pengembangan diri yang dilakukan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendekatan yang bersifat konvensional. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian diri, ilmu pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan nilai serta sikap seseorang. Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) seringkali ditafsirkan terbatas pada upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam suatu proses produksi atau susatu institusi untuk tujuan ekonomis. Demikian pula, investasi manusia melalui pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk membangun manusia mencakup jiwa dan raganya,

Fynna Dewi Febriana, 2018

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

maka mereka harus memiliki pendidikan yang baik. Menurut Sudarsana (2016, vol. 2 hlm. 13) mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan bermanfaat dalam bidang sosio-ekonomi untuk individu seperti perbaikan dalam hal penghasilan dan produktivitas. Meningkatnya pendapatan baik secara perorangan maupun kelompok dan meningkatkan hasil produksi pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelatihan menurut Safitri (2013, vol. 1 hlm.1) diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, kemampuan kompetensi, keterampilan dan perilaku karyawan agar menjadi lebih baik.

Lembaga yang berperan sebagai badan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian adalah BBPP atau Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, merupakan satu-satunya lembaga pusat balai pelatihan pertanian yang ada di Bandung. Salah satu tujuan BBPP Lembang yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pertanian. Tugas BBPP Lembang yaitu melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 101/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013. Menurut Anwas (2013, vol. 19 hlm. 4) pelatihan adalah upaya meningkatkan diri dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan jadi apabila frekuensi pelatihan ditingkatkan maka penyuluh dapat aspek lain yang dapat meningkatkan kompetensinya seperti berinteraksi dengan widyaiswara, sharing pengalaman dengan sesama penyuluh, memperoleh motivasi untuk belajar dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyuluhan. Terdapat dalam PP RI No. 101 Tahun 2000 Pasal 1 (dalam Pakpahan. 2014. Vol. 2 hlm. 3) yang dimaksud dengan pelatihan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Pelatihan pegawai dianggap semakin penting manfaatnya karena sumber daya manusia adalah harta atau aset berharga yang dimiliki organisasi dan juga yang menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan selain itu, pada instansi pemerintahan adalah karena adanya tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan ilmu dan teknologi serta semakin ketatnya persaingan diantara pemberi pelayanan yang sejenis, menurut Fahmi (2015, hlm.18). Berdasarkan

Fynna Dewi Febriana, 2018
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

PERMENTAN Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tersebut ditetapkan pengaturan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi penyuluh pertanian, baik untuk Penyuluh Pertanian Terampil maupun Penyuluh Pertanian Ahli, yaitu sebagai berikut : (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian harus lulus Pendidikan dan Latihan Dasar Penyuluh Pertanian; dan (2) Penyuluh Pertanian yang akan beralih jenjang jabatan dari kelompok Terampil ke Ahli harus lulus Diklat Ahli Kelompok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “ **Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On The Job Training* (OJT) Bagi Penyuluh Pertanian Ahli Di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya Permentan RI yaitu Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian yang mengatur pelatihan ini, sehingga terkesan kaku.
2. Penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan secara berjenjang, yaitu sebelum mengikuti Pelatihan Penyuluh Pertanian Ahli, peserta terlebih dahulu harus mengikuti Pelatihan Penyuluh Pertanian Terampil.
3. Waktu penyelenggaraan yang singkat, dari 21 hari pelatihan yang dijadwalkan, hanya 14 hari saja pemberian teori yang diberikan kepada peserta, dianggap belum memenuhi ketercapaian materi.
4. Pelatihan Penyuluh Pertanian merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Penyelenggaraan Diklat (Yandik) bidang Seksi Pelatihan Aparatur setiap tahunnya dilaksanakan sebanyak beberapa kali.
5. Peserta Pelatihan merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP).

Fynna Dewi Febriana, 2018

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

6. Pelatihan Dasar Fungsional diikuti oleh 80 orang peserta terdiri dari 42 peserta perempuan dan 38 peserta laki-laki yang berasal dari Jawa Barat.
7. Peserta pelatihan harus mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan ini selama 21 hari.
8. Peserta pelatihan dibagi ke dalam 3 angkatan, dimana angkatan 13 terdiri dari 20 orang, angkatan 14 terdiri dari 27 orang, dan angkatan 15 terdiri dari 33 orang.
9. Setiap angkatan terdapat satu orang penyelenggara dari tim evaluasi, dimana masing-masing evaluator akan mengawasi setiap sikap peserta selama pelatihan berlangsung.
10. Hasil penilaian sikap dan materi oleh tim evaluasi akan diberikan kepada pihak Widyaiswara sebagai pertimbangan untuk lulus atau tidaknya peserta pelatihan tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On The Job Training* (OJT) Bagi Penyuluh Pertanian Ahli di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ? Berdasarkan hasil identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah ke dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP Lembang?
2. Bagaimana proses penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP Lembang?
3. Bagaimana hasil analisis SWOT sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP Lembang?

Fynna Dewi Febriana, 2018

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE
JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR
PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan proses perencanaan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On the Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP Lembang.
2. Untuk mendeskripsikan proses penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On the Job Training* (OJT) Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP Lembang.
3. Untuk mengidentifikasi hasil analisis SWOT sebagai faktor yang menjadi pendukung dan faktor penghambat pada penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On the Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP Lembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit ilmu pengetahuan, terkait penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP Lembang.

- a. Memberikan tambahan pengetahuan dalam ilmu pendidikan khususnya pelatihan.
- b. Dapat digunakan untuk acuan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktik

- a. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On the Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli.
- b. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan mengenai

Fynna Dewi Febriana, 2018

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On the Job Training* (OJT) Penyuluh Pertanian Ahli.

- c. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini bisa menjadi perbaikan dan memunculkan inovasi pola baru untuk Pelatihan Dasar Fungsional Pola *On the Job Training* (OJT) bagi Penyuluh Pertanian Ahli.

1.4.3 Manfaat Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap permasalahan yang timbul di lingkungan sosial khususnya permasalahan yang berhubungan dengan pelatihan pola *on the job training* (OJT).

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun Sistematika dalam penelitian ini disusun dengan merujuk pada peraturan Rektor UPI Nomor 6411/UN40/HK/2016 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2016 sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini akan menyajikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan atau struktur organisasi skripsi.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA.** Bab ini berisi tinjauan teoritis yang menjadi landasan dan acuan dalam analisis temuan dan pembahasan masalah penelitian. Adapun teori-teori yang dimuat diantaranya konsep manajemen dan konsep penyelenggaraan pelatihan.
3. **BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini menjelaskan mengenai metode atau prosedur penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yang mencakup desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis sata dan isu etik.
4. **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.** Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Pembahasan dalam bab ini berisikan uraian jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
5. **BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.** Pada Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian

Fynna Dewi Febriana, 2018

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL POLA ON THE JOB TRAINING BAGI PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.